

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017
(*audited*)**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

Jl. Soekarno Hatta No. 725 C Bandung
Telepon/Faksimile (022) 7300014 / 7300002
Website : www.karantina-bandung.deptan.go.id
Email : skpbandung@karantinaonline.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Ringkasan	8
I Laporan Realisasi Anggaran	10
II Neraca	11
III Laporan Operasional	12
IV Laporan Perubahan Ekuitas	13
V Catatan atas Laporan Keuangan	14
A Penjelasan Umum	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1 Pendapatan	21
B.2 Belanja	23
B.2.1 Belanja Pegawai	22
B.2.2 Belanja Barang	24
B.2.3 Belanja Modal Tanah	24
B.2.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
B.2.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25
B.2.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1 Aset Lancar	29
C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan	29
C.1.2 Persediaan	29
C.2 Aset Tetap	30
C.2.1 Tanah	30
C.2.2 Peralatan dan Mesin	30
C.2.3 Gedung dan Bangunan	32
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	33
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34

C.3	Aset Lainnya	34
C.3.1	Aset Lain-lain	34
C.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	35
C.4	Kewajiban Jangka Pendek	35
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.5	Ekuitas	36
C.5.1	Ekuitas	36
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	37
D.2	Beban Pegawai	38
D.3	Beban Persediaan	38
D.4	Beban Barang dan Jasa	39
D.5	Beban Pemeliharaan	40
D.6	Beban Perjalanan Dinas	40
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	41
D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	41
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
E.1	Ekuitas Awal	43
E.2	Surplus/Defisit-LO	43
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	43
E.3.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	43
E.4	Transaksi Antar Entitas	43
E.5	Ekuitas Akhir	43
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	44
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	44
F.2	Pengungkapan Lain-lain	44



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG**

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 725 C BANDUNG
TELEPON/FAKSIMILE (022) 7300002 / (022) 7300014
WEBSITE : www.karantina-bandung.deptan.go.id
EMAIL : skpbandung@karantinaonline.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel No.	Deskripsi	
B.1.	Laporan Realisasi Anggaran	21
B.2.	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
B.3.	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	22
B.4.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017	23
B.4.1.	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	24
B.4.1.1.	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	24
B.4.1.2.	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	24
B.4.1.3.	Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	25
B.4.1.3.1.	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	26
B.4.1.3.2.	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	27
B.4.1.3.3.	Perbandingan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	28
C.1.	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	29
C.2.	Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	29
C.3.	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017	30
C.4.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	34
C.5.	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017	35
D.1.	Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	37
D.2.	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	38
D.3.	Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	39
D.4.	Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	39
D.5.	Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	40
D.6.	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	40
D.7.	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	41
D.8.	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	41
E.9.	Rincian Transaksi Antar Entitas	43

Catatan Hasil Reviu

Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2017

Printout Aplikasi SAIBA Tahun 2017

BAR dan hasil e-Rekon Tahun 2017

Persediaan Tahun 2017

Barang Milik Negara Tahun 2017

Risalah Lelang Tahun 2017

Bendahara Pengeluaran (LPJ, BKU dan BAR Internal)

Bendahara Penerimaan (LPJ, BKU dan BAR Internal)

Tindak Lanjut Itjentan 2017

Akrual 2017

SIMPEG

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.761.540.289,00 atau mencapai 146,80% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.200.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.758.659.767,00 atau mencapai 98,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.867.445.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp8.997.776.991,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp113.677.940,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp8.867.005.024,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp17.094.027,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.422.549,00 dan Rp8.986.354.442,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.705.511.767,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.767.896.357,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.062.384.590,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp40.530.000,00 dan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp59.595.077,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp59.595.077,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.002.789.513,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp8.961.708.027,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.002.789.513,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp4.173.400,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.023.262.528,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp8.986.354.442,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Des 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1.200.000.000,00	1.761.540.289,00	146,80	1.052.059.506,00
Jumlah Pendapatan		1.200.000.000,00	1.761.540.289,00	146,80	1.052.059.506,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	2.900.433.000,00	2.887.665.949,00	99,56	2.948.264.828,00
Belanja Barang	B.2.2	3.043.252.000,00	2.957.326.199,00	97,18	3.006.318.765,00
Jumlah Belanja Operasi		5.943.685.000,00	5.844.992.148,00	98,33	5.954.583.593,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Tanah	B.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.4	500.600.000,00	493.544.619,00	98,59	587.838.360,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.5	373.160.000,00	370.348.000,00	99,24	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.6	50.000.000,00	49.775.000,00	99,55	0,00
Jumlah Belanja Modal		923.760.000,00	913.667.619,00	98,91	587.838.360,00
Jumlah Belanja		6.867.445.000,00	6.758.659.767,00	98,42	6.542.421.953,00

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

II. NERACA

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1	0,00	1.373.023,00
Persediaan	C.1.2	113.677.940,00	103.289.443,00
Jumlah Aset Lancar		113.677.940,00	104.662.466,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	3.577.559.750,00	3.577.559.750,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.903.225.669,00	6.414.978.050,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.140.912.000,00	3.770.564.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	299.063.000,00	249.288.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	15.954.000,00	15.954.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-5.014.284.963,00	-4.284.767.505,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-878.694.057,00	-718.215.671,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-176.730.375,00	-172.366.050,00
Jumlah Aset Tetap		8.867.005.024,00	8.852.994.574,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	367.054.000,00	361.757.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2	-349.959.973,00	-322.051.563,00
Jumlah Aset Lainnya		17.094.027,00	39.705.437,00
Jumlah Aset		8.997.776.991,00	8.997.362.477,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	11.422.549,00	35.654.450,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.422.549,00	35.654.450,00
Jumlah Kewajiban		11.422.549,00	35.654.450,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	8.986.354.442,00	8.961.708.027,00
Jumlah Ekuitas		8.986.354.442,00	8.961.708.027,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		8.997.776.991,00	8.997.362.477,00

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.705.511.767,00	1.048.090.982,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.705.511.767,00	1.048.090.982,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.865.808.724,00	2.970.874.828,00
Beban Persediaan	D.3	464.700.666,00	164.779.746,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.455.608.149,00	1.544.330.843,00
Beban Pemeliharaan	D.5	535.234.300,00	415.054.985,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	520.102.539,00	860.307.850,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	926.441.979,00	890.421.454,00
JUMLAH BEBAN		6.767.896.357,00	6.845.769.706,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.062.384.590,00	-5.797.678.724,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepapsan Aset Non Lancar	D.8	40.530.000,00	0,00
JUMLAH PELEPASAN ASET NON LANCAR		40.530.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	95.157.732,00	3.299.075,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	76.092.655,00	7.236.385,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON OPR.		19.065.077,00	-3.937.310,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		59.595.077,00	-3.937.310,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.022.789.513,00	-5.801.616.034,00

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	8.961.708.027,00	9.203.429.002,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-5.002.789.513,00	-5.801.616.034,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	4.173.400,00	51.759.612,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	4.173.400,00	51.759.612,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.023.262.528,00	5.508.135.447,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		24.646.415,00	-241.720.975,00
EKUITAS AKHIR		8.986.354.442,00	8.961.708.027,00

Bandung, 16 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Iyus Hidayat, MP
NIP. 19650503 199403 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 725 C Bandung-40286, Jawa Barat.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung berkomitmen dengan visi *"menjadi UPT Karantina Pertanian yang Tangguh, Terpercaya dan Handal dengan Mengutamakan Pelayanan Prima."* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyediakan sarana Instalasi Karantina Pertanian dalam rangka memudahkan pelaksanaan tindakan karantina.
- Melengkapi secara bertahap peralatan laboratorium dalam upaya diagnosa hama dan penyakit hewan/tumbuhan secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai standar nasional.
- Menjamin ketersediaan dan kelengkapan alat dan bahan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung kinerja laboratorium.
- Melengkapi sistem informasi dan komunikasi yang modern dan aplikatif.
- Melengkapi sarana transportasi guna mendukung kelancaran kegiatan operasional di lapangan.
- Melengkapi peta daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara akurat dan aktual.
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dengan cara peningkatan keterampilan dan kinerja pegawai.
- Meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat umum, akademis, birokrat maupun pengguna jasa tentang arti pentingnya karantina pertanian.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar dapat mendukung kinerja karantina pertanian.
- Melengkapi sarana pelayanan dalam rangka peningkatan pelayanan prima.
- Mendukung upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel. B.1. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	600.000.000,00	1.200.000.000,00
Jumlah Pendapatan	600.000.000,00	1.200.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	2.685.786.000,00	2.900.443.000,00
Belanja Barang	2.967.852.000,00	2.957.326.199,00
Belanja Modal	3.649.240.000,00	913.667.619,00
Jumlah Belanja	9.302.878.000,00	6.867.445.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.761.540.289,00 atau mencapai 146,80% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Jasa	1.200.000.000,00	1.706.884.790,00	142,24
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0,00	40.530.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	14.125.499,00	0,00
Jumlah	1.200.000.000,00	1.761.540.289,00	146,80

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 67,43% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan Jasa	1.706.884.790,00	1.048.760.431,00	62,75
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	40.530.000,00	0,00	100,00
Pendapatan Lain-lain	14.125.499,00	3.299.075,00	328,16
Jumlah	1.761.540.289,00	1.052.059.506,00	67,43

Untuk pendapatan jasa sensor karantina 31 Desember 2017 jauh lebih meningkat dibandingkan 31 Desember 2016 disebabkan antara lain:

- Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBPN pada Kementerian Pertanian atas pendapatan jasa atas pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan (423215) meningkat dari tahun sebelumnya;
- Pada Wilker TPK Gedebage mengalami peningkatan pendapatan baik Impor maupun Ekspor. Untuk impor terdapat hasil tanaman mati yang sudah diolah berupa kapas serat yang berasal dari Amerika dan Pakistan. Untuk ekspor terdapat kayu albasia ke Negara Cina dan Timur Tengah terlebih lagi tarif PNBPN yang sebelumnya Rp500,00 menjadi Rp2.000,00 per m3 serta produk coklat berupa kakao bubuk dan kakao pasta untuk dikirim ke negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah dan untuk komoditi Karantina Hewan adanya ekspor vaksin ke negara pakistan dan vietnam;
- Pada Wilker Pelabuhan Cirebon untuk saat ini dengan frekuensi ekspor meningkat hanya dari komoditi kayu albasia ke Cina serta Kapas Serat dari Amerika, Australia dan Pakistan;
- Pada Wilker POS (MPC Bandung), peningkatannya pada Domestik Keluar berupa bibit tanaman dari PT. East West Seed untuk dikirim ke seluruh Indonesia; sedangkan impor bibitnya dari Thailand yang telah di uji pada laboratorium SKP I Bandung serta tanaman aquatic dan bibit kaktus yang banyak mendapat perhatian dari negara Taiwan/Asia umumnya serta negara Eropa sekalipun;
- Pada Wilker Bandara Husein Sastranegara, peningkatannya pada Domestik Keluar berupa bunga potong dan bunga mawar serta sayuran untuk seluruh Indonesia sedangkan untuk komoditi Hewan frekuensi ekspor untuk sarang burung walet ke Singapura.

Sedangkan untuk pendapatan lain-lain 31 Desember 2017 mengalami kenaikan dibandingkan 31 Desember 2016, adanya Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa lelang BMN atas pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan (423121) sebesar Rp630.000,00 dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (423122) sebesar Rp39.900.000,00 serta Pendapatan Lain-lain berupa penerimaan kembali belanja pegawai TAYL (423951) sebesar Rp5.292.720,00 dan penerimaan kembali belanja barang TAYL (423952) sebesar Rp8.832.779,00.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.758.659.767,00 atau 98,42% dari anggaran belanja sebesar Rp6.867.445.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2017			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		2.900.433.000,00	2.887.665.949,00	99,56
Belanja Barang		3.043.252.000,00	2.961.944.535,00	97,32
Belanja Modal		923.760.000,00	913.667.619,00	98,91
Total Belanja Kotor		6.867.445.000,00	6.763.278.103,00	98,48
Pengembalian Belanja		0,00	-4.618.336,00	0,00
Total Belanja		6.867.445.000,00	6.758.659.767,00	98,42

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	2017			
	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		6.867.445.000,00	6.763.278.103,00	98,48
Total Belanja Kotor		6.867.445.000,00	6.763.278.103,00	98,48
Pengembalian Belanja		0,00	-4.618.336,00	0,00
Total Belanja		6.867.445.000,00	6.758.659.767,00	98,42

Dibandingkan dengan 31 Desember 2016, Realisasi Belanja 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,30% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan pagu PNBPN sebesar Rp300.000.000,00 pada Revisi DIPA ke-4 tanggal 31 Oktober 2017.

Tabel B.4.1. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	2.887.665.949,00	2.948.264.828,00	-2,05
Belanja Barang	2.957.326.199,00	3.006.318.765,00	-1,62
Belanja Modal	913.667.619,00	587.838.360,00	55,42
Total Belanja	6.758.659.767,00	6.542.421.953,00	3,30

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.887.665.949,00 dan Rp2.948.264.828,00. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -2,05% dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Untuk tahun 2017 anggaran belanja lembur lebih sedikit dibandingkan tahun 2016 karena mendapatkan alokasi tambahan belanja lembur dari Kantor Pusat sebesar Rp126.000.000,00;
2. Adanya pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp2.925.000,00 an. Devi Ayu Komalaningrat, SP dari bulan Januari s.d. September 2017 yang sudah dibayarkan namun yang bersangkutan sedang masa tugas belajar.

Tabel B.4.1.1. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.859.428.085,00	2.864.023.154,00	-0,16
Belanja Lembur	31.940.000,00	85.352.000,00	-62,57
Jumlah Belanja Kotor	2.891.368.085,00	2.949.375.154,00	-1,96
Pengembalian Belanja Pegawai	-3.702.136,00	-1.110.326,00	233,42
Jumlah Belanja	2.887.665.949,00	2.948.264.828,00	-2,05

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.957.326.199,00 dan Rp3.006.318.765,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -1,62 dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya anggaran belanja perjalanan dinas TA 2017 merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran belanja.

Tabel B.4.1.2. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 30 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.370.682.825,00	1.170.776.725,00	17,07
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000,00	140.950.200,00	-99,29
Belanja Barang Persediaan	444.006.535,00	194.002.370,00	128,86
Belanja Jasa	49.700.000,00	230.981.645,00	-78,48
Belanja Pemeliharaan	535.234.300,00	409.299.975,00	30,76
Belanja Sewa	36.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	520.102.539,00	860.347.850,00	-39,54
Jumlah Belanja Kotor	2.956.410.419,00	3.006.358.765,00	-1,66

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Pengembalian Belanja Barang	-916.200,00	-40.000,00	2190,5
Jumlah Belanja	2.957.326.619,00	3.006.318.765,00	-1,62

B.2.3 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel B.4.1.3. Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja modal tanah terdapat pada anggaran awal DIPA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk pembelian tanah di daerah Kertajati-Majalengka/ Rencana Bandara Internasional Jawa Barat namun diambil kembali anggaran tersebut oleh Badan Karantina Pertanian sebesar Rp2.978.580.000,00 karena sudah terdapat realisasi atas Perjalanan Survei Pengadaan Tanah (pengalihan belanja modal perjalanan survei pengadaan tanah) sebesar Rp21.420.000,00 yang direvisi ke belanja perjalanan biasac.

B.2.4 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp493.544.619,00 dan Rp587.838.360,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar -16,04% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan atas penurunan anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2017. Belanja Modal yang sudah terealisasi, berupa:

1. Penambahan pada pengadaan alat komunikasi berupa Handy Talkie sebanyak 2 unit, TV LCD sebanyak 2 unit, Mesin Fax sebanyak 3 unit sesuai dengan SPK Nomor: 149/PL.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan BAST Nomor: 229.a/PL.010/L.47.D/02/2017 Tanggal 10 Februari 2017 dengan nilai Rp19.141.180,00;
2. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa Server sebanyak 2 unit, Rak Server sebanyak 2 unit, UPS sebanyak 4 unit, Laptop sebanyak 3 unit, PC Unit sebanyak 5 unit, Printer Dot Matrix sebanyak 2 unit, Printer Laser Jet sebanyak 4 unit, Infocus/LCD Projector sebanyak 1 unit dan Layar Film/Projector sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 151/PL.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan BAST Nomor: 581/PL.010/K.47.D/04/2017 Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp194.584.439,00;

3. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa Camcorder sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 599/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 18 April 2017 dan BAST Nomor: 635/PL.010/K.47.D/04/2017 Tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp13.471.000,00;
4. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium berupa Vortex sebanyak 1 unit, pH Meter sebanyak 1 unit, Termohyrometer sebanyak 1 unit dan Thermometer Couple sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 634/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 24 April 2017 dan BAST Nomor: 721/PL.010/K.47.D/05/2017 Tanggal 08 Mei 2017 dengan nilai Rp13.530.000,00;
5. Penambahan pada pengadaan Alat Laboratorium Oven Sterilisasi Glassware sesuai SPK Nomor: 636.a/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 25 April 2017 dan BAST No: 996/PL.010/K.47.D/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai Rp17.556.000,00;
6. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium (UV Sterilizer) sesuai dengan SPK Nomor: 1896/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp9.562.000,00;
7. Penambahan pada pengadaan UPS sesuai dengan SPK No: 1905/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017 dan BAST No: 2027/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Rp192.500.000,00;
8. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa 3 buah printer sesuai dengan SPK Nomor: 1910/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017 dan BAST No: 2027.a/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai Rp7.500.000,00;
9. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium berupa Hotplate Stirer sesuai dengan SPK Nomor: 1921/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dan BAST Nomor: 1993/PL.010/K.47/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 dengan nilai Rp9.220.000,00;
10. Penambahan pada pengadaan lemari laboratorium sesuai dengan SPK No: 1969/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dan BAST No: 2068/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 dengan nilai Rp14.960.000,00;
11. Penambahan pada pengadaan tripod sesuai dengan Kuitansi No: 741 tanggal 27 Nopember 2017 dan BAST No: 1976.a/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nilai Rp1.520.000,00.

Tabel B.4.1.4. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	493.544.619,00	587.838.360,00	-16,04
Jumlah Belanja Kotor	493.544.619,00	587.838.360,00	-16,04
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	493.544.619,00	587.838.360,00	-16,04

B.2.5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp370.348.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2017 di antaranya:

1. Penambahan pada pekerjaan Renovasi Atap Gedung Wilker Pelabuhan Cirebon seluas 407 m² sesuai dengan SPK Nomor: 07/RT.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dan BAST Nomor: 342/RT.010/K.47.D/03/2017 Tanggal 03 Maret 2017 dengan nilai Rp195.322.000,00;
2. Penambahan pada pekerjaan renovasi mess wilayah kerja pelabuhan laut cirebon sesuai SPK Nomor: 1165/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1298/PL.020/K.47/09/2017 tanggal 06 September 2017 dengan nilai Rp29.921.000,00;
3. Penambahan pada pekerjaan perbaikan toilet wilayah kerja pelabuhan laut cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1198/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1596/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp11.795.000,00;
4. Penambahan pada pekerjaan tempat parkir wilayah kerja pelabuhan laut cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1200/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1598/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp44.862.000,00;
5. Penambahan pada pekerjaan penataan interior wilayah kerja pelabuhan labut cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1254/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1602/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp58.848.000,00;
6. Penambahan pada pekerjaan perbaikan toilet kantor induk sesuai dengan SPK Nomor: 1569/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 15 September 2017 dan BAST Nomor: 1690.a/PL.020/K.47.D/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan nilai Rp29.600.000,00.

Tabel B.4.1.5. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	370.348.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	370.348.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	370.348.000,00	0,00	0,00

B.2.6 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp49.775.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya anggaran belanja modal jaringan pada TA 2017 di antaranya:

1. Penambahan pada Pengadaan IP PaBX sesuai dengan SPK Nomor: 948/PL.010/K.47.D/07/2017 tanggal 04 Juli 2017 dan BAST Nomor: 1100/PL.010/K.47.D/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan nilai Rp49.775.000,00.

Tabel B.4.1.6. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	49.775.000,00	0,00	100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	49.775.000,00	0,00	100,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.373.023,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.1. Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	1.373.023.00
Jumlah	0.00	1.373.023,00

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung berupa Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan pada wilker Bandara Husein Sastranegara pada tanggal pelaporan adalah Rp1.373.023,00 berupa saldo bulan Desember 2016 yang telah disetor pada ke rekening Kas Negara pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 618732S28EFUGB3O sebesar **Rp239.175,00** dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0C8052TI7LOEME3O sebesar **Rp1.133.848,00**.

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp113.677.940,00 dan Rp104.662.466,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel C.2. Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	113.677.940,00	91.044.027,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	6.618.870,00
Bahan Baku	0,00	5.626.546,00
Jumlah	113.677.940,00	104.662.466,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Atas Barang Konsumsi senilai Rp113.677.940,00. Penurunan pada Bahan Baku berupa bahan kimia padat, bahan kimia cair dan bahan kimia lainnya sebagai bahan pada pengujian laboratorium yang telah habis.

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.577.559.750,00 dan Rp3.577.559.750,00.

Tabel C.3. Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	773 m2	Jl. Walet rt.05 rw.0, Kedawung, Cirebon	624.574.000,00
2.	239 m2	Jl.Cemara rt.01 rw.0, Kejaksan, Cirebon	47.800.000,00
3.	450 m2	Jl. Cijawura Girang No.1-3, Bandung	793.350.000,00
4.	840 m2	Jl. Soekarno Hatta No.725 C, Bandung	2.111.835.750,00
Jumlah			3.577.559.750,00

- Tanah seluas 239 m² terletak di Jl. Cemara - Kejaksan, Cirebon (bersertifikat);
- Tanah seluas 773 m² terletak di Jl. Walet - Kedawung, Cirebon (bersertifikat);
- Tanah seluas 840 m² terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 725 C, Bandung (Bersertifikat, IMB dan Surat Pelepasan Hak Milik atas Tanah); dan
- Tanah seluas 450 m² terletak di Jl. Cijawura Girang 1-3, Bandung (Bersertifikat dan IMB No. 503.644.4/S-3211/Disdab/07).

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.903.225.669,00 dan Rp6.414.978.050,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	6.414.978.050,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	493.544.619,00
Reklasifikasi Masuk	5.962.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-5.297.000,00
Reklasifikasi Keluar	-5.962.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	6.903.225.669,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-5.014.284.963,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.888.940.706,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin atas pembelian senilai Rp493.544.619,00 adalah berupa:

1. Penambahan pada pengadaan alat komunikasi berupa Handy Talkie sebanyak 2 unit, TV LCD sebanyak 2 unit, Mesin Fax sebanyak 3 unit sesuai dengan SPK Nomor: 149/PL.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan BAST Nomor: 229.a/PL.010/L.47.D/02/2017 Tanggal 10 Februari 2017 dengan nilai Rp19.141.180,00;
2. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa Server sebanyak 2 unit, Rak Server sebanyak 2 unit, UPS sebanyak 4 unit, Laptop sebanyak 3 unit, PC Unit sebanyak 5 unit, Printer Dot Matrix sebanyak 2 unit, Printer Laser Jet sebanyak 4 unit, Infocus/LCD Projector sebanyak 1 unit dan Layar Film/Projector sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 151/PL.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan BAST Nomor: 581/PL.010/K.47.D/04/2017 Tanggal 17 April 2017 dengan nilai Rp194.584.439,00;
3. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa Camcorder sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 599/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 18 April 2017 dan BAST Nomor: 635/PL.010/K.47.D/04/2017 Tanggal 25 April 2017 dengan nilai Rp13.471.000,00;
4. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium berupa Vortex sebanyak 1 unit, pH Meter sebanyak 1 unit, Termohyrometer sebanyak 1 unit dan Thermometer Couple sebanyak 1 unit sesuai dengan SPK Nomor: 634/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 24 April 2017 dan BAST Nomor: 721/PL.010/K.47.D/05/2017 Tanggal 08 Mei 2017 dengan nilai Rp13.530.000,00;
5. Penambahan pada pengadaan Alat Laboratorium Oven Sterilisasi Glassware sesuai SPK Nomor: 636.a/PL.010/K.47.D/04/2017 tanggal 25 April 2017 dan BAST No: 996/PL.010/K.47.D/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai Rp17.556.000,00;
6. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium (UV Sterilizer) sesuai dengan SPK Nomor: 1896/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebesar Rp9.562.000,00;
7. Penambahan pada pengadaan UPS sesuai dengan SPK No: 1905/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017 dan BAST No: 2027/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 dengan nilai Rp192.500.000,00;
8. Penambahan pada pengadaan alat pengolah data berupa 3 buah printer sesuai dengan SPK Nomor: 1910/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 14 Nopember 2017 dan BAST No: 2027.a/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai Rp7.500.000,00;
9. Penambahan pada pengadaan alat laboratorium berupa Hotplate Stirer sesuai dengan SPK Nomor: 1921/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 16 Nopember 2017 dan BAST Nomor: 1993/PL.010/K.47/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017 dengan nilai Rp9.220.000,00;
10. Penambahan pada pengadaan lemari laboratorium sesuai dengan SPK No: 1969/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dan BAST No:

2068/PL.010/K.47.D/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 dengan nilai Rp14.960.000,00;

11. Penambahan pada pengadaan tripod sesuai dengan Kuitansi No: 741 tanggal 27 Nopember 2017 dan BAST No: 1976.a/PL.010/K.47.D/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dengan nilai Rp1.520.000,00.; dan
12. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.962.000,00 dari rak kayu menjadi rak besi.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin senilai Rp-11.259.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan berupa meja rapat sesuai dengan dengan nilai sebesar Rp-5.297.000,00 dan reklasifikasi keluar sebesar Rp-5.962.000,00.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.140.912.000,00 dan Rp3.770.564.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	3.770.564.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	370.348.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	4.140.912.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-878.694.057,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	3.262.217.943,00

Mutasi transaksi penambahan pengembangan nilai aset senilai Rp370.348.000,00 adalah berupa:

1. Penambahan pada pekerjaan Renovasi Atap Gedung Wilker Pelabuhan Cirebon seluas 407 m2 sesuai dengan SPK Nomor: 07/RT.010/K.47.D/01/2017 Tanggal 03 Januari 2017 dan BAST Nomor: 342/RT.010/K.47.D/03/2017 Tanggal 03 Maret 2017 dengan nilai Rp195.322.000,00;
2. Penambahan pada pekerjaan renovasi mess wilayah kerja pelabuhan laut Cirebon sesuai SPK Nomor: 1165/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1298/PL.020/K.47/09/2017 tanggal 06 September 2017 dengan nilai Rp29.921.000,00;
3. Penambahan pada pekerjaan perbaikan toilet wilayah kerja pelabuhan laut Cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1198/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1596/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp11.795.000,00;
4. Penambahan pada pekerjaan tempat parkir wilayah kerja pelabuhan laut Cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1200/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 11

Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1598/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp44.862.000,00;

5. Penambahan pada pekerjaan penataan interior wilayah kerja pelabuhan labut cirebon sesuai dengan SPK Nomor: 1254/PL.020/K.47.D/08/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan BAST Nomor: 1602/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 22 September 2017 dengan nilai Rp58.848.000,00;
6. Penambahan pada pekerjaan perbaikan toilet kantor induk sesuai dengan SPK Nomor: 1569/PL.020/K.47.D/09/2017 tanggal 15 September 2017 dan BAST Nomor: 1690.a/PL.020/K.47.D/10/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dengan nilai Rp29.600.000,00.

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp299.063.000,00 dan Rp249.288.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	249.288.000,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	49.775.000,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	299.063.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-176.730.375,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	122.332.625,00

Mutasi transaksi penambahan pada Pengadaan IP PaBX sesuai dengan SPK Nomor: 948/PL.010/K.47.D/07/2017 tanggal 04 Juli 2017 dan BAST Nomor: dengan nilai Rp49.775.000,00.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.954.000,00 dan Rp15.954.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	15.954.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	15.954.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	15.954.000,00

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-6.069.709.395,00 dan Rp-5.175.349.226,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel C.4. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6.903.225.669,00	-5.014.284.963,00	1.888.940.706,00
2.	Gedung dan Bangunan	4.140.912.000,00	-878.694.057,00	3.262.217.943,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.063.000,00	-176.730.375,00	122.332.625,00
4.	Aset Tetap Lainnya	15.954.000,00	0,00	15.954.000,00
Akumulasi Penyusutan		11.359.154.669,00	-6.069.709.395,00	3.589.445.274,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp367.054.000,00 dan Rp361.757.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	361.757.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.297.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	367.054.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-349.959.973,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	17.094.027,00

Mutasi tambah berupa meja rapat dengan sebesar Rp5.297.000,00 reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-349.959.973,00 dan Rp-322.051.563,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	367.054.000,00	-349.959.973,00	17.094.027,00
	Akumulasi Penyusutan	367.054.000,00	-349.959.973,00	17.094.027,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.422.549,00 dan Rp35.654.450,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	752.775,00	22.610.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	10.669.774,00	13.044.450,00
Jumlah	11.422.549,00	35.654.450,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga periode 31 Desember 2017 yang sudah terbayarkan pada bulan Januari 2018 antara lain:

- Belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa kekurangan gaji pegawai an. Altifa dan Astri Hartianti atas kenaikan pangkat dari bulan Oktober s.d. Desember 2017;

- Sedangkan belanja barang yang masih harus dibayar yaitu:
 - a) Belanja langganan listrik periode bulan Desember 2017 sebesar Rp9.871.976,00;
 - b) Belanja langganan telepon periode bulan Desember 2017 sebesar Rp605.398,00; dan
 - c) Belanja langganan air periode bulan Desember 2017 sebesar Rp192.400,00.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.986.354.442,00 dan Rp8.961.708.027,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.705.511.767,00 dan Rp1.048.090.982,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1. Perbandingan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	1.705.511.767,00	1.048.090.982,00	62,72
Jumlah	1.705.511.767,00	1.048.090.982,00	62,72

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan sensor/karantina pengawasan/pemeriksaan. Realisasi atas pendapatan jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.761.540.289,00, dikurangi dengan saldo bulan Desember 2016 yang telah disetor pada bulan Januari 2017 sebesar Rp1.373.023,00, dikurangi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp40.530.000,00 dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp14.125.499,00. Jadi jumlah Pendapatan Operasional-LO per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.705.511.767,00.

Untuk pendapatan jasa (pendapatan sensor/karantina pengawasan/pemeriksaan) per 31 Desember 2017 jauh lebih meningkat dibandingkan 31 Desember 2016 sebesar 62,72%, disebabkan antara lain:

- Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBPN pada Kementerian Pertanian atas pendapatan jasa atas pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan (423215) meningkat dari tahun sebelumnya;
- Pada Wilker TPK Gedebage mengalami peningkatan pendapatan baik Impor maupun Ekspor. Untuk impor terdapat hasil tanaman mati yang sudah diolah berupa kapas serat yang berasal dari Amerika dan Pakistan. Untuk ekspor terdapat kayu albasia ke Negara Cina dan Timur Tengah terlebih lagi tarif PNBPN yang sebelumnya Rp500,00 menjadi Rp2.000,00 per m3 serta produk coklat berupa kakao bubuk dan kakao pasta untuk dikirim ke negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah dan untuk komoditi Karantina Hewan adanya ekspor vaksin ke negara pakistan dan vietnam;
- Pada Wilker Pelabuhan Cirebon untuk saat ini dengan frekuensi ekspor meningkat hanya dari komoditi kayu albasia ke Cina serta Kapas Serat dari Amerika, Australia dan Pakistan;
- Pada Wilker POS (MPC Bandung), peningkatannya pada Domestik Keluar berupa bibit tanaman dari PT. East West Seed untuk dikirim ke seluruh Indonesia; sedangkan impor bibitnya dari Thailand yang telah di uji pada laboratorium SKP I Bandung serta tanaman aquatic dan bibit kaktus yang banyak mendapat perhatian dari negara Taiwan/Asia umumnya serta negara Eropa sekalipun;

- Pada Wilker Bandara Husein Sastranegara, peningkatannya pada Domestik Keluar berupa bunga potong dan bunga mawar serta sayuran untuk seluruh Indonesia sedangkan untuk komoditi Hewan frekuensi ekspor untuk sarang burung walet ke Singapura.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.865.808.724,00 dan Rp2.970.874.828,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	1.930.557.675,00	1.965.432.200,00	-1,77
Beban Pembulatan Gaji PNS	30.576,00	31.128,00	-1,77
Beban Tunj. Anak PNS	49.951.204,00	49.359.376,00	1,19
Beban Tunj. Beras PNS	131.442.300,00	133.542.480,00	1,57
Beban Tunj. Fungsional PNS	193.080.000,00	200.760.000,00	3,82
Beban Tunj. PPh PNS	2.748.365,00	31.660.224,00	-91,31
Beban Tunj. Struktural PNS	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155.685.740,00	160.319.420,00	-2,89
Beban Tunjangan Umum PNS	44.055.000,00	45.870.000,00	-3,95
Beban Uang Lembur	31.940.000,00	85.352.000,00	-62,57
Beban Uang Makan PNS	313.640.000,00	282.168.000,00	11,15
Jumlah	2.865.808.724,00	2.970.874.828,00	-3,53

Penurunan atas beban pegawai ini karena sudah tidak dibayarkan sepenuhnya untuk tunjangan PPh PNS pada tahun 2017 dan anggaran uang lembur tahun 2017 lebih sedikit dari pada tahun 2016 serta terdapat 1 (satu) orang pegawai yang meninggal.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp464.700.666,00 dan Rp164.779.746,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.3. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	0,00	41.600.824,00	0,00
Beban Persediaan konsumsi	464.700.666,00	123.178.922,00	277,25
Jumlah	464.700.666,00	164.779.746,00	180,81

Kenaikan beban persediaan per 31 Desember 2017 disebabkan anggaran DIPA mendapatkan penambahan pada revisi anggaran sumber dana PNBPN menjadikan realisasi untuk beban persediaan konsumsi bertambah berupa bahan laboratorium dengan sampel uji lab yang semakin bertambah baik dari KH maupun KT, cetak dokumen pendukung operasional baik KT maupun KH bertambah sesuai dengan jumlah frekuensi kegiatan pada Wilker UPT SKP I Bandung.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.455.608.149,00 dan Rp1.544.330.843,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.4. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	48.141.425,00	139.450.200,00	-65,47
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	150.840.000,00	103.770.000,00	45,35
Beban Jasa Lainnya	36.200.000,00	19.100.000,00	89,52
Beban Jasa Profesi	13.500.000,00	21.600.000,00	-37,5
Beban Keperluan Perkantoran	536.107.200,00	950.995.225,00	-43,62
Beban Langganan Air	1.163.200,00	2.811.700,00	-58,63
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	360.000.000,00	0,00	100,00
Beban Langganan Listrik	123.670.326,00	132.518.773,00	-6,67
Beban Langganan Telepon	17.082.498,00	20.031.925,00	-14,72
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	127.313.000,00	113.826.000,00	11,84
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.990.500,00	2.185.500,00	82,58
Beban Sewa	36.600.000,00	36.541.520,00	0,16
Beban Honor Output Kegiatan	1.000.000,00	1.500.000,00	-33,33
Jumlah	1.455.608.149,00	1.544.330.843,00	-5,74

Penurunan atas beban barang dan jasa per 31 Desember 2017 sebesar -5,74% disebabkan anggaran untuk beban keperluan perkantoran sedikit dibandingkan

tahun sebelumnya namun terdapat efisiensi atas beban langganan listrik, air dan telepon pada tahun 2017.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp535.234.300,00 dan Rp415.054.985,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.5. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162.661.500,00	135.22.500,00	20,29
Beban Pemeliharaan Jaringan	112.095.500,00	0,00	100,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	24.200.000,00	37.198.000,00	-34,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.277.300,00	236.879.475,00	-0,25
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	5.755.010,00	0,00
Jumlah	535.234.300,00	415.054.985,00	28,95

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 28,95% diantaranya adanya anggaran beban pemeliharaan jaringan untuk cctv dan jaringan, beban pemeliharaan gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp520.102.539,00 dan Rp860.307.850,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	328.967.750,00	479.047.700,00	-31,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.116.000,00	12.870.000,00	-5,85
Beban Perjalanan Dinas PM Dalam Kota	11.025.000,00	19.255.000,00	-42,74
Beban Perjalanan Dinas PM Luar Kota	125.461.789,00	94.321.150,00	33,01
Beban Perjalanan Tetap	42.532.000,00	254.814.000,00	-83,30
Jumlah	520.102.539,00	860.307.850,00	-39,54

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2017 menurun sebesar -39,54% dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penghematan untuk kegiatan perjalanan dinas.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp926.441.979,00 dan Rp890.421.454,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	160.478.386,00	112.333.739,00	42,85
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	700.000,00	700.000,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.664.325,00	2.419.950,00	51,42
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	22.611.410,00	24.109.622,00	-6,21
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	738.987.858,00	750.858.143,00	-1,58
Jumlah	926.441.979,00	890.421.454,00	4,04

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,04% dari pada tahun sebelumnya, diantaranya beban penyusutan gedung dan bangunan serta beban penyusutan jaringan.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel D.8. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	630.000,00	0,00	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	39.900.000,00	0,00	100,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	40.530.000,00	0,00	100,00

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	5.292.720,00	3.299.075,00	60,43
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.832.779,00	0,00	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	81.032.233,00	0,00	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.157.732,00	3.299.075,00	2784,37
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	76.092.655,00	3.615.385,00	2004,69
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	3.621.000,00	-100,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76.092.655,00	7.236.385,00	951,52
Jumlah surplus/defisit Dari Keg Non Opr	19.065.077,00	-3.937.310,00	-584,21
Jumlah	59.595.077,00	-3.937.310,00	-1613,59

Pendapatan pelepasan aset non lancar berupa pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa genteng di wilker pelabuhan laut Cirebon sebesar Rp630.000,00 dan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin atas lelang atas 1 buah kendaraan bermotor roda empat dan 3 buah kendaraan bermotor roda 2.

Untuk pendapatan dari kegiatan non operasional terdiri atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp5.292.720,00 terdiri atas TGR Uang Makan PNS tahun 2016 sebesar Rp1.700.000,00, Pengembalian tunjangan fungsional an. Devi Ayu Komalaningrat tahun 2016 sebesar Rp2.600.000,00 dan Pengembalian kelebihan tunjangan istri sebesar Rp992.720,00.

Untuk penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp8.832.779,00 terdiri atas pembayaran TGR kelebihan perjalanan dinas pegawai tahun 2016 sebesar Rp1.890.000,00, TGR atas pemeliharaan gedung dan bangunan an. CV. Satria Kinayungan sebesar Rp1.758.150,00 dan Rp51.84.629,00 serta Pendapatan atas penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp81.032.233,00. Untuk beban dari kegiatan non operasional terdiri atas beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp76.092.655,00 atas perubahan pada nilai sertifikat yang mengalami perubahan harga.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.961.708.027,00 dan Rp9.203.429.002,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-5.002.789.513,00 dan Rp-5.801.616.034,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.3.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.173.400,00 dan Rp51.759.612,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp4.173.000,00 berupa koreksi nilai aset tetap non revaluasi (391116).

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.023.262.528,00 dan Rp5.508.135.447,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel E.1. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.758.659.767,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.761.540.289,00
Transfer Masuk	26.143.050,00
Jumlah	5.023.262.528,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.986.354.442,00 dan Rp8.961.708.027,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

1. Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-018.12.2.499434/2017 Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp9.302.878.000,00 berubah menjadi sebesar Rp6.352.798.000,00 dengan rincian sumber dana; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp6.052.798.000,00 dan PNPB (PNP) sebesar Rp300.000.000,00. DIPA tersebut mengalami 2 (dua) kali revisi, yaitu sebagai berikut:
 - Revisi ke-1 DIPA, tanggal 20 April 2017 adanya pengoptimalan belanja modal berupa penambahan 1 unit layanan berupa oven sterilisasi glassware dan sewa bandara;
 - Revisi ke-2 DIPA, tanggal 22 Mei 2017 adanya pengurangan/pengambilan anggaran belanja modal tanah dan penambahan belanja modal berupa rehab gedung dan bangunan;
 - Revisi ke-3 DIPA, tanggal 03 Agustus 2017 adanya perubahan pejabat pembendaharaan, pergeseran antar keluaran satu kegiatan satu satker, pergeseran antar jenis belanja (antar akun), ralat renkas dalam hal III DIPA serta pengalihan belanja perjalanan dinas (531111) pengadaan tanah dalam belanja modal yang sudah terealisasi ke belanja perjalanan dinas (524111);
 - Revisi ke-4 DIPA, tanggal 31 Oktober 2017, adanya penambahan pagu PNPB sebesar Rp300.000.000,00 dan penambahan kekurangan gaji;
 - Revisi ke-5 DIPA, tanggal 14 Nopember 2017, optimalisasi sisa anggaran (belanja modal untuk pengadaan tripod dan hot plate stirrer);
 - Revisi ke-6 DIPA, tanggal 28 Desember 2017, adanya perbaikan atas pagu minus.
2. Terdapat koreksi SPM diantaranya:
 - Koreksi SPM GU dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 649/KU.040/K.47.D/04/2017 Tanggal 27 April 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1156/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dengan nilai Rp64.926.050,00 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin menjadi pemeliharaan jaringan;
 - Koreksi SPM GU dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 648/KU.040/K.47.D/04/2017 Tanggal 27 April 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1155/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dengan nilai Rp71.512.850,00 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin menjadi pemeliharaan jaringan;

- Koreksi SPM LS dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 802/KU.040/K.47.D/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1421/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 30 Mei 2017 dengan nilai Rp1.215.000,00 berupa perjalanan dinas tetap;
- Koreksi SPM LS dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 893/KU.040/K.47.D/06/2017 Tanggal 13 Juni 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1618/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 15 Juni 2017 dengan nilai Rp7.578.000,00 berupa perjalanan dinas survei pengadaan tanah namun anggaran belanja modal tanah telah direvisi oleh Badan Karantina Pertanian;
- Koreksi SPM LS dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 891/KU.040/K.47.D/06/2017 Tanggal 15 Juni 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1621/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 15 Juni 2017 dengan nilai Rp7.378.000,00 berupa perjalanan dinas survei pengadaan tanah namun anggaran belanja modal tanah telah direvisi oleh Badan Karantina Pertanian;
- Koreksi SPM LS dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 892/KU.040/K.47.D/06/2017 Tanggal 15 Juni 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-1622/WPB.13/KP.022/2017 Tanggal 15 Juni 2017 dengan nilai Rp6.464.000,00 berupa perjalanan dinas survei pengadaan tanah namun anggaran belanja modal tanah telah direvisi oleh Badan Karantina Pertanian;
- Koreksi SPM LS dengan Surat dari SKP I Bandung dengan No. 1985/KU.040/K.47.D/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dan Surat dari KPPN Bandung I dengan Nomor: S-3709/WPB.13/KP.022/2017 tanggal 05 Desember 2017 dengan nilai Rp2.246.000,00 berupa perubahan redaksi dari belanja perjalanan dinas Tindakan Karantina Tumbuhan (524112) menjadi belanja perjalanan dinas Pembinaan IKT ekspor (524111).